

Judul : DPR Tolak Usulan Skema Baru DMO
Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

| KOMODITAS BATU BARA |

DPR Tolak Usulan Skema Baru DMO

Bisnis, JAKARTA — Komisi VII DPR RI menolak rencana pemerintah menetapkan pembelian harga pasar untuk pasokan batu bara khusus pembangkit listrik domestik seiring dengan usulan pembentukan badan layanan umum atau BLU.

Keputusan itu tertuang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kamis (13/1).

“Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk tidak memberlakukan harga batu bara DMO [*domestic market obligation*] berdasarkan harga pasar,” kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Kamis (13/1).

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah tata niaga pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan

pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN (Persero) dan produsen listrik swasta (*independent power producer/IPP*).

Rencana itu muncul setelah pasokan batu bara pada 17 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sempat kritis pada awal tahun. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyusun strategi agar kondisi serupa tidak berulang.

Hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Perdagangan ditentukan bahwa PLN akan memberi batu bara seharga pasar.

Rencana ini juga disusul dengan pembentukan badan layanan umum (BLU). Nantinya, lembaga itu memberikan subsidi bagi PLN agar mampu membeli batu bara seharga pasar.

Pada saat yang sama, PLN hanya diberikan tugas oleh pemerintah membeli seharga US\$70 per metrik ton. Selisih antara kemampuan PLN dan harga pasar akan ditanggung oleh BLU.

Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan bahwa seluruh kutipan yang akan dilakukan pemerintah harus memiliki dasar dalam undang-undang.

“Apabila akan ada BLU lalu ini akan mengutip atau memungut, maka [harus ada] undang-undang,” tuturnya.

Dia mengingatkan jangan sampai pemerintah memberlakukan kutipan pada perusahaan tambang tidak melalui regulasi yang kuat.

Kementerian juga diminta tegas menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan DMO.

Dewan turut meminta kementerian menyampaikan data pelaksanaan DMO dari perusahaan secara periodik per bulan, sekaligus perusahaan yang dicabut izinnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konsep BLU pada sektor ini sama dengan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendukung operasional proyek B30.

“Rencananya itu akan dilaksanakan kutipan berapa per ton dan dana kutipan itu akan dipakai untuk mendukung dana PLN,” katanya.

Dalam praktiknya nanti, PLN diminta membeli lebih dulu batu bara pada penambang sesuai harga pasar. Kemudian selisihnya akan dikembalikan dari kutipan BLU pada tiap-tiap perusahaan.

“Perusahaan ini tentu saja ada klasifikasinya. Yang *low calorie* akan dikenakan berapa per ton, yang *high calorie* akan ditentukan berapa per ton. Intinya nanti semuanya dikenakan kewajiban itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemko Marves) sempat menyusun usulan pembentukan BLU pada 6 Januari 2022.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa apabila harga pasar batu bara dengan nilai kalori 4.659 kkal/kg senilai US\$62 per ton, maka kebutuhan subsidi per tahun ditanggung BLU mencapai US\$2,52 miliar.

Menko Marves Luhut sempat menyebutkan bahwa skema itu diharapkan agar masalah pasokan batu bara pada PLTU tidak terjadi lagi. (Rayful Mudassir)